

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

I. URUSAN DESENTRALISASI

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Sosial;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan di Bidang Sosial;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kewenangan dan arah kebijakan umum pembangunan bidang kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tercakup pada 12 (dua belas) program urusan sosial. Adapun Program dan Kegiatan pada urusan wajib bidang sosial sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan yang dipergunakan untuk memenuhi belanja pelayanan perkantoran selama 1 tahun. Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;
- 13) Penyediaan Jasa Sopir Kantor;
- 14) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;
- 15) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;
- 16) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Mencakup 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Meubeleur;
- 2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 3) Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;
- 11) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD;
- 12) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- 13) Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Monumen;
- 14) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini berisikan kegiatan Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS Dinas Sosial dan UPTD yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini berisi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Sosialisasi Permendagri dan Perpajakan.

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Sosialisasi Permendagri dan Perpajakan.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;
- 2) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
- 4) Penatausahaan Keuangan SKPD;
- 5) Penyusunan Rencana dan Strategi SKPD.

f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Adapun bentuk kegiatan yaitu Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa pemberian rujukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial se-Sumatera Barat yang dikirim Panti Sosial yang berada di Provinsi Bengkulu guna menjalani rehabilitasi dan pembinaan.

- 2) Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas.

Kehadiran penyandang disabilitas merupakan bagian dari keseluruhan komunitas masyarakat yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen terkait di dalamnya. Kehadiran Penyandang disabilitas dalam suatu keluarga dan lingkungan sosial secara sosiologis terkadang menimbulkan masalah yang mengakibatkan ketidak berfungsi sosial keluarga dan lingkungan serta perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas sehingga memerlukan penanganan serta pelayanan yang terpadu, terarah, berkesinambungan serta profesionalisme.

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan tetapi juga masyarakat baik

melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu Yayasan Pendidikan Luar Biasa atau Yayasan Sosial pelayanan penyandang disabilitas, dan harus dilakukan secara sinergis di seluruh sektor.

g) Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak Terlantar merupakan penyebab dominan dari ketidak mampuan orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu, akibat orang tua/ dan/atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan pelbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar. Dikategorikan anak terlantar apabila :

- 1) Seseorang berusia 5 – 18 tahun
- 2) Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih mempunyai kedua orang tua
- 3) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- 4) Anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

Adapun kegiatan Program ini sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien);

Pengadaan kelengkapan (Biaya klien), di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang untuk 255 orang. Kegiatan ini untuk membiayai kebutuhan harian, kebutuhan pakaian sekolah dan penyediaan kebutuhan bahan praktek keterampilan. Disamping itu juga digunakan untuk penyediaan peralatan olah raga dan sarana kebersihan kelayan selama 1 tahun.

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilaksanakan pada Tri wulan IV pada PSBR Harapan Padang Panjang dan PSAA Tri Murni Padang Panjang dengan kegiatan mengadakan rapat bulanan, *case conference* serta memonitor kelayan yang telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing setelah menamatkan.

- 3) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung. Kegiatan ini dimaksudkan agar anak

terlantar laki-laki kurang mampu yang putus sekolah dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh keahlian sehingga dapat hidup mandiri . Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun sebanyak 2 angkatan dengan masing-masing angkatan berjumlah 80 orang terdiri dari :

- Jurusan Otomotif = 40 orang
- Jurusan elektronika = 40 orang
- Jurusan Las Karbit/Listrik = 40 orang
- Jurusan Instalasi Listrik = 40 orang

4) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang. Dimaksudkan agar anak terlantar perempuan kurang mampu yang putus sekolah terpenuhi kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan/ keahlian sehingga dapat hidup mandiri dengan norma dan etika . Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun sebanyak 2 angkatan dengan masing-masing angkatan berjumlah 100 orang terdiri dari :

- Jurusan Kostum
- Jurusan Bordir

5) Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, telah dilaksanakan selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang, adapun obat-obatan yang disediakan adalah obat-obatan ringan beserta masing-masing seorang tenaga medis.

6) Penyediaan bahan Pendidikan;

Penyediaan bahan pendidikan bagi kelayan PSABR Budi Utama Lubuk Alung, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak asuh sebanyak 75 orang anak selama 1 tahun.

7) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;

Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak, bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Anak khususnya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK), serta untuk *sharing* pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial di Pusat, Propinsi dan Kab/Kota.

8) Pengadaan Makanan dan Minuman Kelayan;

Pengadaan makanan dan minuman (biaya makan klien) selama 1 tahun di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 155 orang dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 100 orang.

9) Sehari Bersama Anak;

Sehari Bersama Anak, adalah perwujudan dari Keppres Nomor 4 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional seiring dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2016 merupakan momentum yang tepat untuk menggugah dan membangkitkan segenap komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua) akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan layanan perlindungan dan kesejahteraannya.

Tujuan umum peringatan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta bersama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengembangan anak secara holistic-integratif dan berkesinambungan serta meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi hak-hak anak berdasarkan *Child Righth*, dan menghindari anak-anak dari penyiksaan, melalaikan, eksploitasi kekerasan terhadap anak, diskriminasi, pemakaian obat-obatan terlarang, pornografi, dll.

10) Bimbingan Teknis Taman Anak Sejahtera;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan dalam pendampingan anak terlantar dalam mengelola Bantuan Sosial Anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Taman Anak Sejahtera.

Sasaran kegiatan ini adalah Pembina Anak Terlantar/Pengurus Lembaga Kesejahteraan Anak/Taman Anak Sejahtera sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.

11) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak).

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan verifikasi terhadap anak yang akan dijadikan anak angkat oleh calon orang tua angkat.

h) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Penyandang cacat (disabilitas) adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik mental atau fisik dan mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pembinaan para panyandang cacat dilaksanakan secara sistem panti dengan tujuan agar dapat menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dilaksanakan selama 1 tahun di Panti Sosial Bina Netera “ Tuah Sakato” Padang untuk kelayan yang berjumlah 50 orang, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membina dan memperbaiki sikap mental para penyandang cacat netra dari sifat konsumtif kepada sifat produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang cacat netra sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta untuk terbina dan terentasnya penyandang cacat netra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Pelatihan yang diberikan berupa pembinaan KUBE dengan memberikan bimbingan, metode dan teknis pelayanan prima kepada pasien serta pembinaan pengelolaan klinik pijat dan pengadministrasian keuangan yang baik.

2) Biaya Makan dan Minum Kelayan;

Biaya makanan dan minuman kelayan yang dilaksanakan selama 1 tahun pada PSBGHI Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dengan jumlah kelayan 100 orang berada di PSBGHI Padang dan 50 orang di PSBN Tuah Sakato Padang.

3) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, pada PSBGHI Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 150 orang anak berupa penyediaan obat-obatan ringan serta penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk oleh Puskesmas setempat.

4) Biaya Kelengkapan Klien;

Biaya kelengkapan klien pada PSBGHI Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang dengan jumlah kelayan 150 orang anak untuk 1 tahun, biaya kelengkapan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian kelayan, kebutuhan praktek dan penyediaan kebutuhan ekstra kurikuler (olahraga, kesenian, pramuka).

5) Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC);

Bimbingan Sosial Pendamping Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada pendamping agar pendamping mengetahui tentang pelaksanaan pemberian bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat berat.

6) Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Cacat Mental);

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma (cacat mental) yang dilaksanakan di PSBGHI Padang kepada 150 orang kelayan selama 1 tahun, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sosial, fisik, mental dan keterampilan bagi anak retardasi mental yang mampu didik dan mampu latih sehingga mereka bisa hidup mandiri di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, disamping itu sasaran kegiatan ini juga bagi orang tua kelayan agar mereka dapat melanjutkan proses pelayanan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut sebagai upaya dan rasa tanggungjawab keluarga.

7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.

Penguatan motivasi penyandang disabilitas memberikan motivasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan jumlah sasaran 150 orang.

i) Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

Panti asuhan anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yatim, piatu atau yatim piatu miskin serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian generasi cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional . Adapun kegiatan program ini sebagai berikut :

1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;

Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti jompo, di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dengan jumlah kelayan 180 orang kelayan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan kesenian kepada para lanjut usia terlantar agar mereka dapat menjalani hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri.

2) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;

Biaya kelengkapan klien panti jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian serta memenuhi bahan pelatihan kelayan lanjut usia, dengan tujuan agar lanjut usia terlantar dapat mengisi hari-hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 180 orang kelayan.

3) Biaya Kelengkapan Klien Panti Asuhan;

Biaya kelengkapan klien di Panti Asuhan PSAA Tri Murni Padang Panjang sebanyak 100 orang anak, biaya ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian anak.

4) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;

Biaya makan dan minum kelayan Jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar, berjumlah 110 orang di

PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan 70 orang di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar yang dilaksanakan selama 1 tahun.

5) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan Jompo, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicinci dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak 180 orang. Adapun obat-obat yang disediakan berupa obat-obatan ringan dan penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk.

6) Biaya Pendidikan Klien;

Biaya pendidikan klien, dilaksanakan di PSAA Tri Murni Padang Panjang terhadap 100 orang anak yang dipergunakan selama 1 tahun untuk biaya alat tulis, pembelian LKS, pembelian perlengkapan sekolah, pembayaran uang pendaftaran murid baru, uang pembangunan dan biaya foto copy materi pelajaran sekolah.

7) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;

Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar selama 1 tahun, yang dipergunakan untuk biaya penguburan dan pemulangan kelayan kepada keluarganya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam panti.

8) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dengan sasaran 75 orang anak, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak asuh, uang jajan, transport, biaya buku dan biaya les serta biaya seleksi calon anak asuh menjadi anak asuh.

9) Biaya Makanan dan Minuman di Panti Asuhan;

Biaya makanan dan minuman klien, pada PSAA Tri Murni Padang Panjang sebanyak 100 orang anak selama 1 tahun.

10) Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan untuk kelayan di PSAA Tri Murni Padang Panjang untuk 100 orang kelayan berupa penyediaan obat-obatan ringan dan seorang tenaga medis yang ditunjuk oleh Puskesmas setempat.

11) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;

Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan pada PSAA Tri Murni Padang Panjang , kegiatan ini bertujuan untuk terjaminnya kelangsungan hidup, tumbuh, kembang dan perlindungan anak, khususnya anak asuh yang berstatus piatu, yatim, yatim-piatu dan miskin sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial setara dengan anak lainnya.

12) Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia;

Bimbingan Sosial Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga tercipta kesamaan pandangan dan pemahaman pelaksana di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan program jaminan sosial lanjut usia secara tepat.

13) Lanjut Usia Berkreasi.

Lanjut Usia Berkreasi bertujuan:

- a) Untuk melembaganya nilai-nilai masyarakat agar selalu menghargai keberadaan lanjut usia.
- b) Mewujudnya dan meningkatnya kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat akan arti pentingnya makna kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.
- c) Termotivasinya dan bergeraknya lanjut usia, keluarga, organisasi sosial, masyarakat dan dunia usaha dan upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan keluarga lanjut usia.

j) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Kelengkapan Klien;

Pengadaan kelengkapan (biaya klien) dilaksanakan selama 1 tahun untuk di PSKW Andam Dewi Sukarami Solok yang berjumlah 40 orang, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian kelayan.

2) Biaya Obat-obatan;

Biaya obat-obatan , dilaksanakan selama 1 tahun pada PSKW Andam Dewi dengan penyediaan obat-obatan ringan serta tenaga medis, banyaknya sasaran kegiatan ini 40 orang kelayan.

3) Pengadaan Makanan dan Minuman;

Pengadaan makanan dan minuman pada PSKW Andam Dewi Sukarami Solok selama 1 tahun untuk 40 orang.

4) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial pada PSKW Andam Dewi Solok, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif eks Wanita Tuna Susila sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peran sosialnya secara wajar serta meningkatkan ketahanan sosial warga binaan terhadap pengaruh buruk lingkungan dengan memberikan bekal agama dan norma etika, sehingga warga binaan dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai dengan kaidah agama dan etika.

5) Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV/AIDS;

Kegiatan dilakukan selama 4 kali bimbingan dengan sasaran kegiatan 20 orang.

6) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah;

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang ketahanan diri, kemampuan sosial, kesadaran siswa terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan mampu mentransformasikan ilmu tersebut dengan baik dan benar kepada lingkungan organisasi sekolah serta teman pergaulan kelompok sebaya di Sekolah dan masyarakat.

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah tahun 2016 adalah sejumlah 61 orang terdiri dari guru dan murid

- 7) Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Dalam rangka penanggulangan Korban Penyalahgunaan Napza di Provinsi Sumatera Barat telah terbentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdiri dari : Yayasan, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) meningkatkan kemampuan dan kecakapan para pengurus RBM dan LKS Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam hal keterampilan;
- b) menumbuhkan harga diri dan kepercayaan korban penyalahgunaan NAPZA secara wajar; dan
- c) memiliki tanggungjawab sosial yang lebih baik dilingkungannya, keluarga, dan masyarakat agar dapat melanjutkan kehidupan secara normatif dan mandiri baik secara sosial maupun ekonomi.

k) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Lembagaan Kesejahteraan Sosial merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Adapun kegiatan program ini sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;

Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, komunikasi, inovasi dan edukasi terhadap kelompok sasaran ke arah yang lebih baik serta untuk terwujudnya pemahaman yang sama kepada para pelaku program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyuluhan sosial guna mendukung keberhasilan program-program dari kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- 2) Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;

Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus orsos dalam mengelola manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan

kinerja orsos dalam melaksanakan tugas dan fungsi menuju kemandirian serta mewujudkan administrasi orsos dengan baik.

- 3) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;

Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk. Sumatera Barat bertujuan :

- a) Untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja PSKS dalam mengemban misi dan kontribusi bidang pengembangan kesejahteraan sosial di lapangan;
 - b) Melihat sejauh mana dedikasi dan prestasi pada PSKS dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - c) Untuk menentukan PSKS yang berprestasi Tk. Sumatera Barat.
- 4) KSN Expo dan Award dalam HKSAN Tahun 2015;

KSN Expo dan Award Dalam HKSAN Tahun 2015, bertujuan sebagai media publikasi dan promosi berbagai pihak, instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi non pemerintah/LSM, dunia pendidikan dan pelaku usaha lain yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk upaya menuju Indonesia sejahtera.

- 5) Penguatan Nilai-Nilai KSN;

Penguatan Nilai-nilai KSN tahun 2016, yang jatuh pada tanggal 20 Desember setiap tahunnya merupakan momentum untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mendayagunakan peran aktif masyarakat luas khususnya masyarakat mampu secara melembaga dan berkelanjutan untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan sosial.

- 6) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kabupaten/Kota;

Penyusunan Sinergitas Program Antar Kabupaten/ Kota, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bentuk program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab/Kota serta untuk menjalin koordinasi, keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Sosial Kab/Kota.

- 7) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Sosial (LKKS) se Sumatera Barat bertujuan memberikan motivasi kepada pengurus LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- 8) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Koordinasi dilaksanakan dengan 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

- 9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs);

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanggulangi masalah sosial seperti kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah sosial dilingkungannya sendiri secara bersama-sama, dan bahkan diharapkan dapat secara bersama-sama pula mengembangkan potensi diri, sehingga dapat diwujudkan masyarakat maju dan berkembang.

- 10) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos di bidang administrasi manajemen orsos dan bidang pelayanan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos dalam pengelolaan manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b) Meningkatnya kinerja LKS/Orsos dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju kemandirian;
- c) Terwujudnya administrasi LKS/Orsos dengan baik; dan
- d) Terhimpunnya LKS/Orsos yang di akreditasi dan diusulkan pada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta.

- 11) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat;

Sasaran kegiatan ini sejumlah 55 orang dengan tujuan membekali kemampuan para TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- 12) Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat.

- 13) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;

Sasaran kegiatan ini sejumlah 50 orang dengan tujuan membekali kemampuan dan keberfungsian Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- 14) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang PSM se-Sumatera Barat.

- 15) Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan agar PSM se-Sumatera Barat saling berbagi pengalaman dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta solusi bagi mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- 16) Sidang Tim Penilaian Pengkajian Gelar Daerah (TP2GD).

l) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS);

Bimbingan motivasi sosial/ keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS), bertujuan untuk meningkatkan motivasi berusaha keluarga tidak mampu/miskin dalam meningkatkan keterampilan berusaha serta menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan keluarga dengan mengembangkan jiwa dan semangat kesetiakawananan sosial dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera.

Sementara metode kegiatan adalah Penyuluhan, Kampanye Sosial Keluarga dan Bhakti Sosial.

- 2) Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah sosial ekonomi;

Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah sosial, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen usaha keluarga (KK) rentan miskin dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

- 3) Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se Sumatera Barat;

Pengadaan Beras Untuk Panti Sosial Swasta bertujuan membantu Panti Sosial swasta dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam Panti.

- 4) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil;

Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil, dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga dampingan dan petugas pendamping serta masyarakat eks warga yang terampil mandiri, dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan bahan alam yang ada disekitar kebun dan tanaman masyarakat tersebut.

- 5) Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM;

Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta peran pendamping KUBE-FM sehingga memiliki kualifikasi kemampuan, keahlian serta sikap mental yang mampu membina kelompok dan keluarga fakir miskin agar produktif dan mandiri.

- 6) Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota;

Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab/Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat layanan informasi, konsultasi rujukan dalam penanganan permasalahan keluarga sesuai dengan

kebutuhan, serta sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dari segi mana LK3 masih memiliki kelemahan / kendala dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat dijadikan bahan penyusunan program serta langkah-langkah Pemberdayaan Keluarga selanjutnya.

7) Bintek Tim Pengendali dan Pendamping Askesos;

Bimbingan Teknis Tim Pengendali dan Pendamping Askesos bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan pengetahuan teknis Tim Pengendali dan Pendamping tentang Program Askesos;
- b) Meningkatkan kemauan Tim Pengendali dan Pendamping untuk memfasilitasi Pengelolaan Askesos dalam pelaksanaan Program Askesos;
- c) Meningkatkan kemampuan untuk memahami program Askesos sebagai program yang memberikan perlindungan sosial dan jaminan pertanggungjawaban bagi kelompok masyarakat pekerja sektor informal yang rentan terhadap berbagai kondisi kehidupan.

8) Pelatihan Keterampilan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan;

Pelatihan Keterampilan Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan, tujuan dari kegiatan ini adalah dapat terpulihkan kembali harga diri, percaya diri, kemauan serta kemampuan para korban untuk melaksanakan fungsi sosial secara wajar serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam memperbaiki kehidupan masyarakat untuk menangani permasalahan sosial serta memperbaiki kualitas hidup para penyandang masalah sosial.

9) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan;

Kegiatan ini bertujuan memberikan bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan dalam bentuk modal usaha.

10) Asistensi Pengembangan UEP Korban Pekerja Migran;

Kegiatan ini memberikan bantuan stimulan bagi korban pekerja migran yang telah memiliki embrio usaha.

11) Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;

Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi, merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a) Untuk mewujudkan penilaian yang obyektif dan partisipatif untuk memungkinkan terjalannya pengalaman, prestasi dalam pengelolaan KUBE FM, serta pendamping berprestasi.
 - b) Mewujudkan media tukar pengalaman antar pengurus KUBE, serta pendamping secara kondusif yang dapat menggambarkan perkembangan dan dinamika KUBE serta pendamping.
 - c) Mewujudkan kompetisi sehat, spontan dan menjunjung nilai –nilai kebersamaan dalam berprestasi.
 - d) Terjalannya KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat untuk diikutsertakan pada seleksi tingkat Nasional tahun 2016.
 - e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota kelompok KUBE.
- 12) Penetapan calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2016;

Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan terhadap mereka yang masih belum tersentuh proses Pembangunan Nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Fokus perhatian Pemberdayaan KAT adalah mereka yang berada di daerah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam Pemberdayaan KAT berupa:

- a) Penjajagan Awal, tujuannya adalah untuk (1) menemukali sekaligus menghimpun data etnologi KAT dalam suatu wilayah untuk mendapatkan data awal tentang Komunitas Adat Terpencil, (2) Menghimpun data potensi

dan sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan (3) Menetapkan katagori Komunitas Adat terpencil sesuai dengan kriteria dan kenyataan dilapangan.

- b) Semiloka Daerah Hasil Study Kelayakan bertujuan untuk memperoleh masukan bentuk kegiatan Pemberdayaan KAT dan dukungan keterpaduan program dari Dinas/Instansi terkait serta masyarakat maupun Perguruan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya serta membahas kelayakan lokasi sebagai suatu calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil di Sumatera Barat tahun 2016.

- 13) Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan.

Koordinasi ini diikuti oleh petugas dari instansi terkait dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

- 14) Sosialisasi Program Keluarga Harapan tingkat Kecamatan;

Sosialisasi ini diikuti oleh 25 aparatur dari kecamatan penerima PKH.

- 15) Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan;

- 16) Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana;

- 17) Sosialisasi Psikososial korban Bencana;

- 18) Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana;

- 19) Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB);

- 20) Sosialisasi Bantuan Hibah dalam negeri dalam bentuk uang;

- 21) Pelayanan Orang Terlantar;

- 22) Bantuan Usaha bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

- 23) Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT)

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel A.2.1. Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Pencapaian Target		Ket
			Jumlah	%	
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
1	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelaksanaan rujukan PMKS di Sumatera Barat	5 orang penyandang disabilitas	100	Kapasitas rujukan tidak memadai
2	Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas	Tersusunnya Pergub tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan tersosialisasikan Perda Disabilitas	2 Peraturan Gubernur dan 10 Kegiatan	100	
2	Program Pembinaan Anak Terlantar				
1	Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien)	Terpenuhinya kelengkapan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang	255 orang (155 orang laki-laki, 100 orang perempuan)	100	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Termonitor dan terevaluasi serta tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan anak terlantar	1 kegiatan	100	
3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)	Terpenuhinya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar untuk melakukan usaha kerja.	160 orang (laki-laki) jurusan otomotif, jurusan elektronika, jurusan instalasi listrik, jurusan las listrik/karbit	100	
4	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang)	Terpenuhinya keterampilan anak terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang	100 orang (perempuan)	100	
5	Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpeliharanya kesehatan kelayan di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang	1 tahun	100	
6	Penyediaan bahan Pendidikan;	Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	75 orang (laki-laki)	100	
7	Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak	Terjalinnnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan petugas sosial kab/ kota tentang penanganan perlindungan anak	125 orang	100	

8	Pengadaan Makanan dan Minuman Kelayan	Terpenuhiya kebutuhan makan dan minum kelayan di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang	255 orang (155 org laki-laki, 100 org perempuan)	100	
9	Sehari Bersama Anak	Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang anak	200 orang	100	
10	Bimbingan Teknis Taman Anak Sejahtera	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan taman anak sejahtera	28 orang	100	
11	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak	24 orang	99.60	
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma				
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi kelayan tuna netra di PSBN Tuah Sakato Padang	50 orang (36 laki-laki, 14 perempuan)	100	
2	Biaya Makan dan Minum Kelayan	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang	150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)	100	
3	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpeliharanya kesehatan anak cacat di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI	1 tahun	100	
4	Biaya Kelengkapan Klien	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang	150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)	100	
5	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC)	Meningkatnya pengetahuan pendamping dalam rangka mendampingi penerima jaminan sosial terhadap penyandang disabilitas berat	66 orang	100	
6	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Cacat Mental)	Meningkatnya kemandirian serta keberfungsian sosial anak cacat	100 orang (50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan)	100	
7	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Adanya kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas	150 orang	100	
4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo				
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	Meningkatnya kemandirian lanjut usia di PSTW Sabai nan aluih sicincin dan PSTW Kasih Sayang Cubadak	180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	100	
2	Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo	Terpenuhinya kelengkapan kelayan di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu	180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	100	
3	Biaya Kelengkapan Klien Panti Asuhan	Terpenuhinya Kelengkapan Anak Asuh di	100 orang	100	

		PSAA Tri Murni Padang Panjang	(perempuan)		
4	Biaya Makanan dan Minimum Klien di Pantu Jompo	Terpenuhinya kebutuhan Makan kelayan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih	180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	100	
5	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	1 tahun	100	
6	Biaya Pendidikan Klien	Meningkatnya pengetahuan anak asuh yang dilayani di PSAA Tri Murni Padang Panjang Dalam Pantu	100 orang (perempuan)	100	
7	Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien	Terlaksananya pemakaman dan pemulangan kelayan kepada keluarganya	2 UPTD	100	
8	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Pantu Asuhan	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	75 orang (laki-laki)	100	
9	Biaya Makanan dan Minuman di Pantu Asuhan	Terpenuhinya kebutuhan pangan anak asuh di PSAA Tri Murni Padang Panjang	100 orang (perempuan)	97.35	
10	Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpeliharanya kesehatan anak asuh di PSAA Tri Murni Padang Panjang	100 orang (perempuan)	100	
11	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Pantu Asuhan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan terhadap anak asuh	100 orang (perempuan)	100	
12	Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendamping program jaminan sosial lanjut usia sesuai pedoman kerja	85 orang	100	
13	Lanjut Usia Berkreasi	Meningkatnya kepedulian masyarakat luas terhadap lanjut usia	250 orang	100	
5	Program Pembinaan Eks Panyakandang Panyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Panyakit Sosial Lainnya)				
1	Pengadaan Kelengkapan Klien	Terpenuhinya kelengkapan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok	40 orang (perempuan)	77.87	
2	Biaya Obat-obatan	Terpenuhinya obat-obatan kelayan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok	1 tahun	100	
3	Pengadaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan pangan klien eks tuna susila pada PSKW Andam Dewi Solok	40 orang (perempuan)	100	
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Panyakandang Panyakit Sosial	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi kelayan eks panyakandang panyakit sosial	40 orang (perempuan)	100	
5	Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV/AIDS	Meningkatnya keterampilan eks korban napza dalam mengembangkan usaha dan meningkatnya fungsi sosialnya.	4 kali, 20 orang	98.46	

6	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Meningkatnya pengetahuan siswa/pelajar tentang penanggulangan narkoba dan penyandang masalah sosial (PMS) di Sekolah	61 orang	100	
7	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA.	Meningkatnya pengetahuan peserta tentang pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) korban penyalahgunaan napza	LKS Kab/Kota se-Sumatera Barat	100	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
1	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Terinformasikannya program pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	19 paket	100	
2	Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat	Termotivasinya pengurus organisasi sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	50 orang	100	
3	Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat	Termotivasinya para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	50 orang, 4 lembaga	100	
4	KSN Expo dan Award dalam HKSNI Tahun 2016	Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalinnnya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial	1 kegiatan	100	
5	Penguatan Nilai-Nilai HKSNI	Terpenuhinya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)	800 orang, 1 kegiatan	100	
6	Penyusunan Sinergitas Program Antar Kabupaten/Kota	Terjalinnnya sinergitas program/ kegiatan antara Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kab/ Kota	52 orang	100	
7	Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	Termotivasinya pengurus LKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sosial	200 orang	98.60	
8	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan LKS	19 Kab./Kota	66.97	
9	Penguatan peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Sustainable Development Goals	Termotivasinya pengurus posdaya dalam penanggulangan kemiskinan	1.200 orang, 19 Kab/Kota	100	

	(SDGs)				
10	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	Termotivasinya Pengurus Organisasi Sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesiapan akreditasi	40 orang	100	
11	Bimbingan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	Termotivasinya TKSK untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	55 orang	100	
12	Pertemuan pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termodifikaasinya pengurus KT untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	50 orang	100	
13	Bimbingan kapasitas bagi pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termodifikaasinya pengurus KT untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	50 orang	100	
14	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	Terinformasikannya program pengembangan kesejahteraan sosial kepada PSM selaku ujung tombak di Lapangan	30 orang	100	
15	Pertemuan Forum omunitas Pkerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	Terinformasikannya program pembangunan kesejahteraan kepada masyarakat	35 orang	100	
16	Sidang Tim Penilaian Pengkajian Gelar Daerah (TP2GD)	Rekomendasi nama calon pahlawan daerah	1 Tahun	100	
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya				
1	Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS).	Meningkatnya keterampilan keluarga rentan miskin dan adanya peningkatan pendapatan keluarga rentan miskin	50 orang	100	
2	Bimbingan dan pelatihan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah sosial ekonomi	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan KK rentan dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya	110 orang	100	
3	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta se-Sumatera Barat	Terpenuhinya pemberian bantuan pangan beras bagi kelayan dalam panti sosial swasta se-sumatera barat	4.650 orang anak (Panti Swasta)	99.71	
4	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan warga Komunitas Adat Terpencil dalam pengembangan usahanya	30 orang	100	
5	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM	Meningkatnya kemampuan pendamping dalam mendampingi KUBE dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha	50 orang	100	
6	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota	Meningkatnya pengetahuan dan	19 Kab/Kota	100	

		profesionalisme pengurus LK3 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya			
7	Bimtek Pengendalian dan Pendamping Askesos	Meningkatnya pemahaman tim pengendali dan pendamping tentang Askesos	33 orang	100	
8	Pelatihan keterampilan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya keterampilan UEP Korban Tindak Kekerasan untuk melakukan usaha	69 orang	100	
9	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan	Terpenuhinya kebutuhan hidup para Korban Tindak Kekerasan melalui bantuan UEP KUBE	Kab.Dharmasraya, Kab.Sijunjung, Kab.Pessel, Kab.Padang Pariaman, Kab.50 Kota, dan Kota Padang	100	
10	Asistensi Pengembangan UEP Korban Pekerja Migran	Meningkatnya kemampuan berusaha penerima bantuan UEP Pekerja Migran dan terlaksananya pemulangan orang terlantar ke tempat lain	Kab.Dharmasraya, Kab.Sijunjung, Kab.Pessel, Kab.Padang Pariaman, Kab.50 Kota, dan Kota Padang	100	
11	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE berprestasi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota KUBE	19 orang pengurus KUBE dan 19 orang pendamping	100	
12	Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun 2016	Adanya rekomendasi calon lokasi KAT	1 rekomendasi	100	
13	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	Terkoordinasinya PKH diantara dinas/instansi terkait	38 orang	100	
14	Sosialisasi Program Keluarga Harapan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya informasi/pemahaman aparaturnya Kecamatan tentang pelaksanaan PKH	25 aparaturnya Kecamatan PKH	100	
15	Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	Meningkatnya kinerja pendamping dan operator dalam kelancaran pelaksanaan PKH	38 orang	100	
16	Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana	Meningkatnya pemahaman Tim Penanganan Bencana	36 orang	100	

17	Sosialisasi Psikososial Korban Bencana	Meningkatnya pemahaman tim psikososial dalam rangka pemulihan korban bencana	36 orang	100	
18	Rapat koordinasi pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Meningkatnya pemahaman TRC penanganan Bencana	36 orang	100	
19	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Meningkatnya pemahaman Tim Pengendali dan Pendamping Askesos	38 orang	100	
20	Sosialisasi Bantuan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Meningkatnya Pemahaman dan Pengendalian Tim	45 orang	100	
21	Pelayanan Orang Terlantar	Meningkatnya peran paguyuban dan pemulangan orang terlantar	45 orang	100	
22	Bantuan Usaha bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Meningkatnya kesejahteraan keluarga rentan dan WRSE	200 KK rentan	30	
23	Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan KAT	Meningkatnya motivasi dan pemahaman warga KAT dalam pelaksanaan pemberdayaan Sosial	43 KK warga KAT	100	

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2008 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2003 dan Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang sosial. Sebagai pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun DUK Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kondisi 2016 dapat dilihat pada Tabel A.4.1 halaman berikutnya.

Tabel A.4.1 DUK Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kondisi tahun 2016

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Golongan			Pejabat Struktural		Fungsional	
	Pendidikan	Jumlah	Pangkat	Gol	Jumlah	Jabatan Struktural	Jumlah	Jabatan Fungsional	Jumlah
246	SD	16	Juru Muda	I/a	1	Kepala Seksi	35	Peksos Madya	1
	SLTP/SMP	12	Juru Muda Tk.1	I/b	13	Kepala Sub Bagian	3	Peksos Penyelia	3
	SLTA	82	Juru	I/c	3	Kepala UPTD	7	Peksos Pelaksana Lanjutan	
	D3	14	Juru Tk.1	I/d	3	Kepala Bidang	3	Peksos Pelaksana	
	S1	111	Pengatur Muda	II/a	9	Sekretaris	1	Penyuluh Sosial Muda	1
	S2	11	Pengatur Muda Tk.1	II/b	31	Kepala Dinas	1	Penyuluh Sosial Pertama	1
			Pengatur	II/c	11			Peksos Pelaksana Pemula	
			Pengatur Tk.1	II/d	6			Peksos Pertama	1
			Penata Muda	III/a	15			Calon Peksos Pertama	5
			Penata Muda Tk.1	III/b	48			Calon Penyuluh Sosial Pertama	1
			Penata	III/c	18				
			Penata Tk.1	III/d	67				
			Pembina	IV/a	12				
			Pembina Tk.1	IV/b	8				
			Pembina Utama Muda	IV/c	0				
			Pembina Utama Madya	IV/d	1				

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel A.5.1 halaman berikutnya.

Tabel A.5.1. Realisasi Program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Dana	Realisasi	
			Keuangan	Fisik (%)
	BELANJA LANGSUNG	33.609.226.372	30.633.146.994	93,16%
	BELANJA LANGSUNG UMUM	13.754.132.152	11.429.476.655	86,73%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.068.376.978	4.728.688.198	99,04%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	55.442.126	55.366.981	100,00%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	796.930.000	603.557.120	100,00%
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	315.020.000	314.669.000	100,00%
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;	588.034.574	586.479.950	100,00%
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;	145.334.937	145.222.249	100,00%
	6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	101.074.150	101.042.585	100,00%
	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	95.901.326	95.894.700	100,00%
	8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	1.046.066.800	980.325.325	100,00%
	9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	174.683.065	138.892.200	84,09%
	10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.560.000	59.140.000	100,00%
	11) Penyediaan Makanan dan Minuman;	159.790.000	158.970.000	100,00%
	12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;	640.453.000	625.195.088	100,00%
	13) Penyediaan Jasa Sopir Kantor;	120.900.000	119.350.000	100,00%
	14) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;	599.753.000	582.903.000	100,00%
	15) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;	78.584.000	78.080.000	100,00%

	16) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.	88.850.000	83.600.000	100,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.777.417.174	5.890.982.811	78,32%
	1) Pengadaan Meubeleur;	1.833.670.000	1.796.195.200	99,89%
	2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	280.460.000	280.337.000	100,00%
	3) Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi;	363.050.000	312.284.500	86,15%
	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi;	4.650.000	4.400.000	100,00%
	5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;	82.000.000	82.000.000	100,00%
	6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;	35.750.000	24.926.945	100,00%
	7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;	225.495.174	202.114.215	100,00%
	8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Kantor;	30.800.000	30.375.000	100,00%
	9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	60.700.000	60.550.000	100,00%
	10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;	82.255.000	82.255.000	100,00%
	11) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD;	114.100.000	114.085.000	100,00%
	12) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;	4.384.020.000	2.643.963.200	63,15%
	13) Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Monumen;	139.467.000	138.548.250	100,00%
	14) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.	141.000.000	118.948.501	100,00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	137.160.000	135.977.000	100,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.	137.160.000	135.977.000	100,00%

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84.340.000	14.550.000	21,75%
	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	18.340.000	14.550.000	100,00%
	2) Sosialisasi Permendagri dan Perpajakan	66.000.000	0	0,00%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	686.838.000	659.278.646	96,53%
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;	26.000.000	26.000.000	100,00%
	2) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;	79.766.000	77.022.246	100,00%
	3) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;	72.990.000	72.015.000	100,00%
	4) Penyusunan Rencana dan Strategi SKPD.	15.000.000	15.000.000	100,00%
	5) Penatausahaan Keuangan SKPD	493.082.000	469.241.400	95,17%
	BELANJA LANGSUNG WAJIB	19.855.094.220	19.203.670.339	97,61%
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	142.813.060	105.217.860	100,00%
	1) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	95.110.460	71.640.260	100,00%
	2) Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas	47.702.600	33.577.600	100,00%
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	4.591.718.125	4.565.432.925	100,00%
	1) Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien);	552.465.000	551.872.000	100,00%
	2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;	34.865.000	33.738.250	100,00%
	3) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	543.424.950	542.194.000	100,00%

	4) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);	760.566.300	758.071.200	100,00%
	5) Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	10.288.000	10.288.000	100,00%
	6) Penyediaan bahan Pendidikan;	200.025.650	200.025.650	100,00%
	7) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;	158.824.950	151.895.950	100,00%
	8) Pengadaan Makanan dan Minuman Kelayan;	2.252.333.775	2.252.333.775	100,00%
	9) Sehari Bersama Anak;	26.528.700	26.528.700	100,00%
	10) Bimbingan Teknis Taman Anak Sejahtera.	12.376.900	12.086.500	100,00%
	11) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	40.018.900	26.398.900	99,60%
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	2.606.317.070	2.604.953.950	100,00%
	1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;	493.693.210	492.906.710	100,00%
	2) Biaya Makan dan Minum Kelayan;	1.419.035.200	1.419.034.800	100,00%
	3) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	17.611.800	17.611.800	100,00%
	4) Biaya Kelengkapan Klien;	226.394.000	225.901.300	100,00%
	5) Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC);	83.675.300	83.625.300	100,00%
	6) Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Cacat Mental);	348.790.160	348.756.640	100,00%
	7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.	17.117.400	17.117.400	100,00%
9	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	4.704.184.470	4.701.336.017	100,00%
	1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;	468.569.150	468.508.650	100,00%

	2) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;	263.908.828	263.174.000	100,00%
	3) Biaya Kelengkapan Klien Panti Asuhan;	196.400.000	196.365.000	100,00%
	4) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;	1.632.612.452	1.632.612.452	100,00%
	5) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	57.179.700	57.179.700	100,00%
	6) Biaya Pendidikan Klien;	317.185.650	315.311.000	100,00%
	7) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;	30.800.000	30.800.000	100,00%
	8) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;	207.552.000	207.492.000	100,00%
	9) Biaya Makanan dan Minuman di Panti Asuhan;	940.288.000	940.286.550	100,00%
	10) Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	14.466.000	14.466.000	100,00%
	11) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;	475.918.550	475.836.525	100,00%
	12) Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia;	71.639.140	71.639.140	100,00%
	13) Lanjut Usia Berkreasi.	27.665.000	27.665.000	100,00%
10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.082.816.450	1.028.086.650	96,27%
	1) Pengadaan Kelengkapan Klien;	178.150.000	138.698.500	77,87%
	2) Biaya Obat-obatan;	25.990.000	25.949.500	100,00%
	3) Pengadaan Makanan dan Minuman;	377.468.300	369.219.500	100,00%
	4) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;	341.867.500	340.867.500	100,00%
	5) Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV/AIDS;	64.763.450	63.763.450	98,46%
	6) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah;	58.477.500	55.682.500	100,00%

	7) Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA.	36.099.700	33.905.700	100,00%
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.182.740.000	1.960.045.300	93,29%
	1) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;	50.000.000	50.000.000	100,00%
	2) Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;	54.492.000	54.263.000	100,00%
	3) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;	97.496.000	94.339.600	100,00%
	4) KSN Expo dan Award dalam HKS Tahun 2016;	32.000.000	30.698.000	100,00%
	5) Penguatan Nilai-Nilai HKS;	150.000.000	149.997.800	100,00%
	6) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kabupaten/Kota;	59.733.000	59.733.000	100,00%
	7) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;	532.202.000	481.427.200	98,60%
	8) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	420.666.000	266.881.200	66,97%
	9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs);	417.132.000	408.727.500	100,00%
	10) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	62.670.000	61.074.000	100,00%
	11) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	58.294.000	57.999.000	100,00%
	12) Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	53.458.000	53.458.000	100,00%
	13) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	56.857.000	56.707.000	100,00%
	14) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	50.000.000	50.000.000	100,00%

	15) Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	50.000.000	50.000.000	100,00%
	16) Sidang Tim Penilaian Pengkajian Gelar Daerah (TP2GD)	37.740.000	34.740.000	100,00%
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	4.544.505.045	4.238.597.637	93,66%
	1) Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS).	100.000.000	100.000.000	100,00%
	2) Bimbingan dan pelatihan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah sosial ekonomi	20.000.000	20.000.000	100,00%
	3) Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se Sumatera Barat	2.805.140.645	2.797.030.645	99,71%
	4) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil	57.885.750	57.885.750	100,00%
	6) Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM	90.000.000	89.440.000	100,00%
	7) Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota	107.000.000	105.499.600	100,00%
	8) Bintek Pengendalian dan Pendamping Askesos	51.940.100	51.940.100	100,00%
	9) Pelatihan Keterampilan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan	47.323.900	46.573.900	100,00%
	10) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan	56.600.000	56.592.600	100,00%
	11) Asistensi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Korban Pekerja Migran	60.980.000	60.484.000	100,00%
	12) Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	102.764.000	101.171.400	100,00%

13)	Penetapan calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2015;	122.350.250	118.848.660	100,00%
14)	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	54.932.200	54.932.200	100,00%
15)	Sosialisasi Program Keluarga Harapan Tingkat Kecamatan	35.297.200	35.297.200	100,00%
16)	Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	53.002.200	53.002.200	100,00%
17)	Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana	53.962.200	53.962.200	100,00%
18)	Sosialisasi Psikososial Korban Bencana	53.962.200	53.961.857	100,00%
19)	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	53.962.200	53.640.000	100,00%
19)	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	60.462.200	58.562.125	100,00%
20)	Sosialisasi Bantuan Hibah dalam Negeri dalam bentuk Uang	62.062.200	62.062.200	100,00%
21)	Pelayanan Orang Terlantar	18.916.800	12.050.000	100,00%
22)	Bantuan usaha bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	400.000.000	119.700.000	30,00%
23)	Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan KAT	75.961.000	75.961.000	100,00%
Jumlah		33.609.226.372	30.633.146.994	93,16%

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan yang dilakukan dalam menyusun program Pembangunan Kesejahteraan Sosial mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dimana dimulai dari Penyusunan RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKA SKPD.

a. Penyusunan RENSTRA SKPD

Proses Penyusunan RENSTRA mengacu kepada Prioritas agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Prioritas RPJMD Bidang Sosial :

- 1) Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat.
- 2) Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal.

RENSTRA mencakup Visi dan Misi Program Kerja dan Kegiatan yang mengacu kepada RPJMD Bidang Sosial.

b. Rancangan RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD untuk dibicarakan di forum SKPD kemudian dijadikan bahan Musrenbang tingkat Provinsi. Hasil Musrenbang dijadikan rancangan akhir RKPD kemudian ditetapkan menjadi RKPD. Hasil Penetapan RKPD dijadikan renja masing-masing SKPD.

c. RENJA SKPD

Renja SKPD berisikan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada jangka waktu 1 tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. Untuk menjaga konsistensi RKPD disusun dengan menggunakan Renja SKPD dan dikoordinasikan melalui forum SKPD. Renja SKPD mencakup rencana kerja yang disusun oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan berikut kebutuhan dana dilaksanakan langsung oleh SKPD. Karena Renja SKPD adalah jabaran dari Renstra SKPD, maka program dan kegiatan yang ditetapkan harus lebih rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerja.

d. RKA SKPD

RKA-SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. Sebelum ditetapkan RKA SKPD, SKPD terlebih dahulu menyusun KUA/ PPAS.

RKA mencakup :

- 1) Informasi Program dan Kegiatan; dan
- 2) Informasi Anggaran.

Setelah RKA SKPD disusun, maka ditetapkan menjadi rincian APBD SKPD. Berdasarkan proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran tersebut setelah melalui Pembahasan dengan Tim Anggaran Provinsi dan DPRD maka ditetapkan APBD masing-masing SKPD yang dituangkan dalam bentuk DPA SKPD.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik APBD maupun APBN serta Tugas Pembantuan kurang memadai dengan tersedianya 9 (sembilan) Bangunan Kantor yang terdiri dari 1 bangunan kantor Dinas dan 8 bangunan Kantor UPTD yang didukung dengan fasilitas Jaringan Komputerisasi, Alat Transportasi roda 2 dan roda 4, adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Masih ada beberapa gedung/ bangunan kantor yang mengalami kerusakan akibat pasca gempa tanggal 30 September 2009 yang belum direnovasi, diantaranya pagar kantor, gedung asrama dan work shop di beberapa UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- b. Peralatan praktek anak terlantar pada panti PSABR Budi Utama Lubuk Alung tidak layak dipakai lagi karena bahan percontohan anak terlantar tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat sekarang. Peralatan praktek anak terlantar pada panti PSBR Harapan Padang Panjang masih menggunakan peralatan manual dan belum dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.
- c. Peralatan praktek penyandang disabilitas pada tuna netra untuk saat ini telah menggunakan fasilitas komputer Braille yang juga didukung oleh instruktur yang berkompeten di bidang teknologi informasi.
- d. Masih kurangnya kendaraan operasional pada Dinas dan 8 UPTD.

8. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan serta fisik kegiatan dapat terealisasi sesuai target. Namun, dari 12 program dan 117 kegiatan, terdapat 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik tidak mencapai 100% antara lain :

- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- 3) Sosialisasi Permendagri dan Perpajakan;
- 4) Pengadaan Kelengkapan Klien;
- 5) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 6) Bantuan usaha bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

II. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b) DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : SP.DIPA-027.03.4.089141/2016 dan tanggal 07 Desember 2015.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Sosial RI tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya.

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan dengan menyediakan rumah bagi warga KAT sebanyak 76 unit, memberikan bantuan jaminan hidup untuk 162 KK, memberikan bantuan peralatan (kerja & rumah tangga) dan bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan bagi 76 KK warga KAT, serta menyediakan infrastruktur lainnya bagi warga KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran Tugas Pembantuan tahun 2016 sebesar : **Rp. 2.739.987.000,-**

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut :

a) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dengan Sub Kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Pembangunan Rumah Sederhana bagi Warga KAT sebanyak 76 Unit di Dusun Masat;
- 2) Bantuan Jaminan Hidup bagi Warga KAT untuk 162 KK di Dusun Masat dan Dusun Kulukubuk;
- 3) Bantuan Bibit Tanaman bagi Warga 76 Paket di Dusun Masat;
- 4) Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga, 76 Paket di Dusun Masat;
- 5) Bantuan Peralatan Rumah Tangga untuk 76 Paket di Dusun Masat;

Realisasi Fisik Kegiatan = Rp. 2.739.987.000,- (100%) dan Realisasi Keuangan sebesar = Rp. 2.293.369.119,- (83,70%).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan cukup memadai dengan tersedianya sumber daya seperti petugas yang berkompeten, fasilitas jaringan komputerisasi, dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan Tugas Pembantuan yang sifatnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai pelaksana, petunjuk kegiatan dan kerangka acuan di buat oleh Kementerian Sosial.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2016 secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan

9. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada tugas pembantuan antara lain:

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat		Gol.
5 orang	Pasca Sarjana	1 orang	Pembina Tk.1	1 orang	4b
	Sarjana	1 orang	Penata Tk.1	1 orang	3d
	SMA/SMK	3 orang	Pengatur	1 orang	2c
			Pengatur Muda	2 orang	2a

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan Nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat karena urusan sosial merupakan urusan yang menyangkut kepada pelayanan dasar terhadap masyarakat, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program pembangunan kesejahteraan sosial yang dirancang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, pada tahun 2016 ini telah berjalan untuk tahun ke 1. Hasil yang dicapai dari program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial telah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok masyarakat sasaran yang sangat rentan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

B. SARAN

- 1) Koordinasi dengan Kab/Kota terkait *updating* data PMKS sebagai dasar penyusunan program/kegiatan baik dari dana dekonsentrasi maupun dana desentralisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan sasaran.

Padang, Desember 2016

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

H. Abdul Gafar, SE.,MM.
NIP. 19601225 198303 1 010